

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini disebabkan karena pendidikan diyakini mampu mencetak manusia-manusia unggul dan berkualitas. Keyakinan tersebut juga sejalan dengan fungsi pendidikan nasional yang dituangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memiliki posisi yang strategis dalam upaya pembangunan bangsa. Posisi strategis tersebut sebaiknya juga diimbangi dengan perhatian terhadap setiap komponen di dalamnya. Salah satu komponen yang layak mendapat perhatian khusus dalam sistem pendidikan adalah guru. Menurut Ardakani, dkk. (2012), guru merupakan komponen pendidikan yang paling efektif dan efisien. Selain itu, guru juga berperan sebagai salah satu motor penggerak dalam sistem pendidikan.

Oleh karena itu, guru memiliki peran yang sangat besar untuk mencapai keberhasilan pendidikan nasional. Hingga saat ini, masyarakat meyakini bahwa

guru bukan seorang pengajar saja, melainkan juga sebagai pendidik dan pembimbing. Sebagai pengajar, guru dituntut untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, sedangkan sebagai seorang pendidik, guru diharapkan untuk bisa membentuk mental dan karakter anak didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Keutamaan guru, 2014). Dalam hal ini, guru diharapkan mampu untuk memberikan teladan-teladan positif bagi murid-muridnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Heyneman & Loxley (dalam Widoyoko & Rinawati, 2010) juga memperkuat besarnya peran serta guru dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 16 negara berkembang, guru memberikan kontribusi sebesar 34%, manajemen sekolah 22%, waktu belajar 18%, dan sarana fisik memberikan andil 26% terhadap prestasi siswa. Sedangkan penelitian dari 13 negara industri menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda, yaitu guru berkontribusi sebesar 36%, manajemen sekolah 23%, waktu belajar 22%, dan sarana fisik 19% (Supriadi, 2005; dalam Widoyoko & Rinawati, 2010). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa guru tetap memberikan kontribusi yang paling besar terhadap prestasi siswa, baik di negara berkembang maupun negara maju.

Melihat betapa besarnya peran guru dalam tatanan pendidikan nasional, maka tidak heran apabila muncul asumsi bahwa guru merupakan ujung tombak dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Kualitas guru juga diyakini memiliki korelasi yang positif terhadap kualitas pendidikan suatu negara. Seperti yang

diungkapkan oleh Beumgart & Neil (2007; dalam Jalal, dkk., 2009) bahwa kualitas guru yang baik mampu mencetak siswa yang berprestasi. Begitu pula sebaliknya, guru yang memiliki kualitas rendah juga berimplikasi terhadap rendahnya prestasi siswa.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa profesi guru memiliki kekhasan tersendiri. Wajar apabila guru mendapat julukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sayangnya, berbagai keistimewaan yang melekat pada profesi guru tidak lantas membuat guru luput dari berbagai krisis atau permasalahan. Sulistyono, Ketua PB PGRI, memaparkan beberapa trend isu terkait profesi guru di Indonesia, yaitu mulai dari jumlah dan distribusi guru yang belum optimal, status guru honorer, kualitas, kompetisi, kualifikasi, kesejahteraan guru, hingga perlindungan terhadap guru (Inilah masalah yang dihadapi guru se-Indonesia, 2011).

Adanya guru honorer merupakan suatu problematika khas yang terus melekat dalam tatanan keguruan di Indonesia. Mulyasa (2006) mendefinisikan guru honorer sebagai guru yang diangkat secara resmi oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru. Secara administratif, guru honorer memiliki status sebagai guru tidak tetap. Pada PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan mendefinisikan guru tidak tetap sebagai guru yang diangkat secara sementara oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BHPT (Badan Hukum Perguruan Tinggi), atau badan hukum lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan, berdasarkan perjanjian kerja. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa guru honorer merupakan guru yang diangkat secara resmi oleh

pemerintah untuk mengatasi kekurangan guru yang berstatus sebagai pekerja tidak tetap untuk melaksanakan tugas mendidik dan mengajar sesuai bidang kompetensinya.

Banyaknya guru honorer disetiap daerah juga memiliki variasi jumlah. Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan guru-guru di daerah yang bersangkutan serta kebijakan dari pemerintah daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Disdikpora DIY, jumlah guru tidak tetap atau honorer di daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta sendiri sangat banyak. Pada jenjang TK hingga SMA jumlah guru honorer di Kabupaten Bantul adalah 1.209 guru TK, 1.735 guru SD, 714 guru SMP, 318 guru SMA dan 464 guru SMK (Gaji sebulan hanya cukup dimakan seminggu, 2014).

Permasalahan selanjutnya yang cukup erat dengan keberadaan guru honorer adalah permasalahan kesejahteraan. Meski kesejahteraan guru di Indonesia secara umum cukup rendah, akan tetapi guru honorer memiliki kondisi yang lebih memprihatinkan. Menurut *World Education Indicator* (WEI) 2007, guru di Indonesia memperoleh gaji yang sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Tahun 2005/2006, gaji guru pertahun di Indonesia berkisar antara \$2.733-\$4.756, sedangkan rata-rata gaji guru pertahun untuk negara-negara OECD pertahun berkisar antara \$27.723-\$51.879 (Payong, 2011).

Hal tersebut juga diperkuat dengan perbedaan gaji guru di Indonesia dengan Malaysia yang cukup signifikan. Dalam Kongres Guru Indonesia 2010 di *Sampoerna School of Education Building*, Atase Pendidikan Kedutaan Besar

Malaysia, Dato' Paduka Junaidy Abu Bakar mengungkapkan bahwa gaji guru mula di Malaysia atau di Indonesia disebut sebagai guru baru, berjumlah 1.405 RM ditambah tunjangan rutin 340 RM, sehingga totalnya akan mencapai Rp 4.941.222,33. Sementara itu, gaji guru PNS golongan I di Indonesia hanya berkisar antara satu hingga 2,5 juta (Uh, Gaji Guru Mula di Malaysia Rp 5 Juta, 2010).

Sistem penggajian antara guru honorer dengan guru PNS jelas berbeda. Data di atas gambaran gaji yang diterima oleh guru PNS, dimana setidaknya setiap bulan mereka mendapatkan gaji pokok minimal 2,5 juta untuk golongan I. Gaji pokok tersebut masih akan ditambah dengan gaji ketigabelas setiap tahunnya yang setara dengan satu kali gaji pokok. Hal tersebut jauh berbeda dengan gaji atau honorarium yang diterima oleh guru honorer. Sistem penggajian guru honorer juga memiliki perbedaan pada beberapa daerah. Guru honorer di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapatkan honorarium sebesar 50.000-100.000 per bulan (kompas.com, 2013, Guru Honor Diupah Rp 50.000 Per Bulan). Sedangkan daerah Lampung dan Jawa Barat honorarium pada guru honorer diberikan tidak lebih dari 500.000 dalam setiap bulannya (Hardiknas, Guru Madrasah Justru Menderita, 2013).

Sebagai tenaga pendidik profesional, tidak ada pemakluman bagi guru honorer dalam menjalankan profesinya. Dengan statusnya sebagai pegawai tidak tetap, guru honorer tetap diwajibkan untuk bekerja sesuai peran dan tugas guru sebagaimana mestinya. Kompetensi keguruan pun diwajibkan untuk dikuasi oleh

guru honorer. Mulai dari kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial hingga kompetensi kepribadian. Di antara keempat kompetensi tersebut, penguasaan materi pembelajaran, merupakan salah satu bentuk dari kompetensi keguruan yang mengambil peran penting dalam kegiatan belajar mengajar. Sudjana (2002; dalam Widoyoko, 2006) menunjukkan bahwa 76.6% hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kinerja guru dengan rincian, kemampuan guru mengajar memberikan kontribusi sebanyak 32.43%, penguasaan materi pelajaran berperan sebanyak 32.38% dan sikap guru terhadap mata pelajaran berkontribusi 8.06%.

Uraian di atas menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat tajam antara guru honorer dengan guru PNS. Guru honorer tetap mendapatkan tuntutan kompetensi yang setara dengan guru PNS, walaupun *reward* yang mereka terima cukup jauh dari standar kelayakan. Adanya perbedaan fasilitas kesejahteraan guru honorer dengan guru PNS, bukan alasan bagi guru honorer untuk tidak menguasai kompetensi keguruan. Profesi guru dengan perannya sebagai tenaga pendidik, mengharuskan mereka untuk benar-benar memiliki keterampilan mengajar maupun menguasai materi pembelajaran. Dapat dibayangkan bagaimana kualitas pendidikan yang akan terbentuk apabila guru tidak memiliki kompetensi dalam pengajaran. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Purwianingsih, dkk. (2010) bahwa guru seyogianya memiliki pengetahuan dalam mengajarkan bahan ajar. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan pengajaran yaitu usaha mengarahkan siswa untuk memahami aspek konten mata pelajaran. Tujuan

tersebut tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak disertai dengan pengetahuan akan strategi pengajaran yang tepat.

Hal tersebut secara tidak langsung mengatakan bahwa kemampuan mengajar serta penguasaan materi pelajaran merupakan sebuah kemutlakan bagi guru, baik itu guru honorer maupun guru PNS. Oleh karena itu, penguasaan akan konten mata pelajaran dan cara pengajaran harus dikuasai oleh guru secara beriringan. Pengetahuan akan cara pengajaran tersebut pada akhirnya akan mengarahkan guru untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Hal tersebut oleh Shulman kemudian diformulasikan sebagai *pedagogical content knowledge* (PCK). Shulman (1986; dalam Purwianingsih, dkk., 2010) mendefinisikan PCK sebagai pemahaman konseptual yang kaya dan dipadukan dengan keahlian dalam menggunakan prosedur mengajar, strategi dan pendekatan yang akan diterapkan dalam proses pengajaran di kelas.

Way, dkk. (2013) juga menguatkan pentingnya *pedagogical content knowledge*. Menurut Way, dkk. (2013), untuk meningkatkan kualitas pengajaran tidak bisa dilakukan jika guru hanya memperdalam pengetahuan akan konten atau materi ajar saja. Guru juga harus mengembangkan kemampuan pedagogisnya sejalan dengan pemahaman kontennya, dengan memiliki kemampuan *pedagogical content knowledge*, guru dapat membantu muridnya untuk meningkatkan pemahaman akan materi ajar yang disampaikan, membentuk suasana belajar yang efektif dan efisien, serta terdorong untuk melakukan praktek pengajaran yang terbaik. Selain itu, Way, dkk. (2013) juga menyatakan bahwa

untuk menjadi pengajar yang baik, guru harus memiliki *pedagogical content knowledge* yang kuat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa *pedagogical content knowledge* merupakan jiwa dalam proses pengajaran. Dengan demikian, penting bagi guru untuk memiliki *pedagogical content knowledge*. Sayangnya tidak semua guru memiliki fasilitas yang sama untuk meningkatkan hal tersebut, misalnya adalah guru honorer. Pihak FHI (Forum Honorer Indonesia) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kompetensi guru diperlukan gaji yang memadai karena mereka harus membeli buku-buku yang menunjang (lahatonline; 2015, 26 September). Pengupayaan untuk membeli buku penunjang mungkin bukan suatu masalah bagi guru PNS karena mereka mendapatkan gaji yang cukup layak. Akan tetapi, upaya tersebut memunculkan kesulitan tersendiri bagi guru honorer karena guru-guru honorer mendapatkan penghasilan yang sangat minim. Bahkan pihak FHI pun mengungkapkan jika penghasilan yang diterima guru honorer tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (lahatonline; 2015, 26 September).

Adanya fakta tersebut tidak mengherankan jika pada akhirnya muncul asumsi-asumsi di masyarakat bahwa guru honorer memiliki kinerja atau kompetensi yang tidak baik. Bahkan rendahnya kompetensi pada guru honorer saat ini tidak berhenti pada taraf asumsi semata. Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud mengatakan bahwa kinerja guru honorer rata-rata masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya guru

honorar yang tidak lulus dalam tes CPNS (Kualitas guru honorar masih rendah, 2015).

Fakta tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan DI, salah satu guru di SMA Negeri 2 Bantul. Di mengatakan bahwa gambaran umum profesionalitas guru honorar berada pada taraf rata-rata. Meski terdapat beberapa guru honorar yang menunjukkan dedikasi dan profesionalitas yang baik, tetapi tetap terdapat guru honorar yang menunjukkan kinerja yang tidak baik. Terlebih untuk guru-guru honorar yang sudah mengabdikan selama lebih dari tiga tahun, pada umumnya mereka akan menunjukkan penurunan kualitas kerja. Berdasarkan penuturan DI, salah satu bentuk kinerja guru honorar yang tidak baik adalah sering terlambat dalam memulai jam pengajaran.

“Kalo kinerjanya itu kebanyakan selama ini itu rata-rata saja, ya biasa gitu nggak menonjol banget, tapi juga nggak buruk-buruk banget. Intinya biasa lah.”

“Kalau yang kinerjanya buruk itu ya mesti ada mbak. Di sini itu ada yang guru honorar yang susah dicarinya. Paling sering itu kalau mulai ngajar itu sering terlambat juga. Nah kalau kompetensinya itu ya tidak bagus-bagus banget. Seperti yang saya bilang tadi, standar aja gitu mbak. Apalagi untuk guru-guru honorar yang sudah tiga tahun empat tahun, itu penurunannya terlihat. Tapi juga ada yang konsisten bagus, seperti Pak AT sama Pak KS itu.”

Menariknya, dengan tunjangan kesejahteraan yang kurang memuaskan tidak lantas membuat semua guru honorar bekerja dengan setengah hati. Guru honorar tetap memiliki semangat untuk mengambil bagian dalam suksesi pendidikan nasional. Salah satunya adalah Maman Supratman. Maman Supratman adalah seorang guru di SMPN 17 Bekasi. Beliau merupakan seorang guru honorar aktif

yang telah mengabdikan selama 40 tahun. Beliau juga dinilai berprestasi karena mampu melestarikan angklung dan kesenian tradisional lainnya (Mendikbud Jawab Surat Terbuka Soal Guru Honorer Maman Supratman, 2014).

Selain Maman Supratman, Nurbaya juga merupakan salah satu jajaran guru honorer yang berprestasi. Ibu Nurbaya merupakan seorang guru honorer di SMK 1 Kosgoro Solok. Beliau telah menjadi guru honorer sejak tahun 2000. Sebagai guru honorer, Ibu Nurbaya mampu mendapatkan predikat sebagai pemenang harapan II nasional guru berprestasi, dari lomba karya tulisnya yang mengangkat tema “Menjadikan Generasi Cerdas yang Agamis melalui Sistem Ajar Profesional dengan Pemanfaatan Media Pembelajaran” (Nurbaya, Guru Honor Berprestasi Tingkat Nasional, 2013).

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dipahami *pedagogical content knowledge* merupakan kemampuan yang penting bagi guru. Hal tersebut berkaitan dengan pengaruh *pedagogical content knowledge* terhadap kualitas pengajaran guru. Akan tetapi, tidak semua guru honorer memiliki motivasi dan kehendak untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Di sisi lain, terdapat figur-figur guru honorer yang tetap memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensi *pedagogical content knowledge* ditengah keterbatasan yang dimiliki. Berawal dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melihat gambaran *pedagogical content knowledge* yang dimiliki oleh guru honorer. Diharapkan, penelitian ini dapat mengungkap secara komprehensif gambaran *pedagogical content knowledge* yang dimiliki oleh guru honorer.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada *pedagogical content knowledge* guru honorer. Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam *grand tour question*, bagaimana gambaran *pedagogical content knowledge* pada guru honorer? Untuk memperdalam bidang kajian, maka penulis mengajukan *sub-question*:

- a. Bagaimana gambaran *pedagogical knowledge* pada guru honorer?
- b. Bagaimana gambaran *content knowledge* pada guru honorer?

1.3 Signifikansi Penelitian

Penelitian mengenai *pedagogical content knowledge* cukup banyak dilakukan di luar negeri. Akan tetapi, penelitian tersebut pada umumnya bertujuan untuk melihat kompetensi yang dimiliki oleh calon guru maupun guru-guru baru, seperti penelitian yang dilakukan oleh See (2015). Penelitian yang dilakukan oleh See (2014) dilatarbelakangi oleh kurangnya persiapan pedagogis terhadap guru-guru di Malaysia. Permasalahan lain yang pada umumnya sering dihadapi oleh guru-guru baru adalah ketidakcakapan dalam pengetahuan, skill mengajar, serta sifat-sifat lain sebagai seorang guru. Guru-guru baru pada umumnya mengalami keterkejutan saat menghadapi realita yang tidak sesuai dengan teori yang telah mereka pelajari selama masa training maupun masa pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, See (2014) melakukan penelitian tentang kemampuan *pedagogical content knowledge* pada guru baru. Penelitian

tersebut dilakukan dengan cara memberikan mentoring pada guru-guru baru, kemudian dilihat bagaimana perkembangan *pedagogical content knowledge* pada guru baru tersebut. Penelitian tersebut melibatkan 146 guru baru dan 90 guru mentor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penyediaan mentoring bagi guru baru terhadap peningkatan kemampuan *pedagogical content knowledge*. Dengan kata lain, penyediaan guru mentor bagi guru baru terbukti dapat meningkatkan kemampuan *pedagogical content knowledge* guru baru.

Bagi guru honorer di Indonesia, tidak semuanya mendapatkan fasilitas guru mentor untuk membimbing diawal masa kerjanya. Hanya beberapa sekolah saja yang menyediakan guru supervisi untuk menilai kemajuan kompetensi guru. Oleh karena itu, guru honorer diharapkan untuk mengembangkan sendiri kompetensi *pedagogical content knowledge*. Sayangnya, guru honorer tidak diberi fasilitas berupa kesejahteraan yang memadai untuk melakukan pengembangan kompetensi tersebut. Menurut ketua PHI (lahatonline; 2015, 26 September), untuk meningkatkan kompetensi guru, mereka perlu membeli buku sebagai bahan belajar penunjang. Akan tetapi, guru honorer dibenturkan dengan sedikitnya jumlah gaji yang mereka terima, sehingga mereka memiliki keterbatasan dana untuk membeli buku penunjang tersebut.

Penelitian lain berupaya untuk melihat pengaruh BAS (*Behavioral Approach System*) sebagai prediktor terhadap perilaku kerja atau *work performance* yang dilakukan oleh Izadikhah, dkk. (2010). Penelitian tersebut

menggunakan sistem *reward* sebagai prediksi akan kinerja seseorang. Sementara itu, BAS (*Behavioral Approach System*) sendiri merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan sensitivitas seseorang terhadap *reward* dan *punishment* serta pengelolaan perilaku *appetitive* yang kemudian diarahkan pada peristiwa aktual maupun potensial yang positif. Penelitian dilakukan pada 123 pekerja berdasarkan penilaian dari supervisornya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAS memberikan efek secara tidak langsung terhadap performan kerja. Seseorang memiliki kinerja yang paling baik disaat perusahaan juga memberikan reward yang tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi reward atau gaji yang diperoleh, seseorang akan menunjukkan performan kerja yang semakin baik pula.

Hasil penelitian itu cukup kontradiktif dengan kenyataan yang terjadi pada guru honorer di Indonesia. Sebagai guru dengan status tidak tetap, guru honorer mendapatkan reward atau honorarium yang sangat rendah. Akan tetapi, peran profesionalnya menuntut guru honorer untuk tetap memiliki dan menguasai kompetensi profesionalitas, seperti kompetensi *pedagogical content knowledge*.

Sedangkan penelitian di Indonesia tentang *pedagogical content knowledge* lebih banyak dilakukan pada guru mata pelajaran tertentu. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih (2015) yang berupaya untuk melihat representasi *pedagogical content knowledge* pada guru fisika dalam menyampaikan materi getaran dan gelombang untuk siswa SMP. Selain itu, Margiyono & Mampouw (2011) juga melakukan penelitian yang serupa, yaitu

penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan kompetensi *pedagogical content knowledge* guru matematika dalam mengajarkan materi bilangan rasional.

Sementara itu, penelitian dengan konteks guru honorer mayoritas dilakukan pada konstruk-konstruk motivasi ataupun kinerja guru honorer. Penulis belum menemukan penelitian tentang gambaran kompetensi *pedagogical content knowledge* pada guru honorer. Salah satu penelitian yang mengkaji guru honorer adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih dan Wibowo (2011) yang tentang perbedaan motivasi kerja antara guru PNS dan non PNS yang ditinjau dari aspek kepemimpinan, kepuasan gaji dan lingkungan kerja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata motivasi kerja guru PNS lebih tinggi jika dibandingkan dengan motivasi kerja pada guru non PNS ditinjau dari semua aspek (Wahyuningsih dan Wibowo; 2011).

Berdasarkan kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penulis belum menemukan penelitian yang mengungkapkan gambaran kompetensi *pedagogical content knowledge* pada guru honorer. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian tentang *pedagogical content knowledge* lebih berfokus pada guru mata pelajaran tertentu. Di sisi lain, penelitian terkait *pedagogical content knowledge* pada umumnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (Izadikhah, dkk., 2010; Margiyono & Mampouw, 2011; See, 2014; Purwaningsih, 2015). Penulis belum menemukan penelitian tentang *pedagogical content knowledge* dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji gambaran *pedagogical content knowledge* pada guru honorer. Untuk mendapatkan gambaran *pedagogical content knowledge* yang baik, guru honorer yang akan menjadi subyek dalam penelitian ini juga guru honorer yang telah memiliki *pedagogical content knowledge* yang baik pula. Kriteria baik tersebut dapat dilihat dari penguasaan akan materi ajar, memiliki kemampuan mengajar yang baik, serta pemahaman akan metode atau teknik pengajaran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif sehingga penulis dapat memberikan uraian secara komprehensif dan mendalam tentang gambaran *pedagogical content knowledge* pada guru honorer.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Menjelaskan gambaran *pedagogical content knowledge* pada guru honorer
- b. Menjelaskan gambaran *pedagogical knowledge* pada guru honorer.
- c. Menjelaskan gambaran *content knowledge* pada guru honorer.

1.5 Manfaat

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian ilmiah terkait konsep *pedagogical content knowledge*.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Memberi gambaran atau *role-model* bagi guru honorer lain untuk memiliki *pedagogical content knowledge* yang baik.
2. Referensi untuk penelitian selanjutnya berkaitan tentang *pedagogical content knowledge* pada guru honorer.

